

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'ruf. 2016. *Manajemen Dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Aswaja Pressindo. Yogyakarta
- Arhaeda. 2016. *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Papan Reklame Di Kota Makassar*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar.
- Hardani, d. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu
- H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Jalil, Husni dan Andi Abidin. 2017. *Hukum Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Otonomi Khusus*. Makassar : SIGn.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesi.*, Jakarta : Pranamedia.
- Mardiani. 2018. "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menata Dan Membina Pedagang Kaki Lima Di Banda Aceh". *Law Jurnal*. 2(1): 233-246.
- Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal KELOLA : Jurnal Ilmu Sosial* Vol. 1 No. 2 Tahun 2018.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum.
- Putri, Denny Perdani. 2017. "Peran satuan polisi pamong paraja terhadap penegakan perda bengkalis nomor 1 tahun 2016 tentang ketertiban umum di kabupaten bengkalis". *Jurnal Law*. edisi 2. Media Yogyakarta.
- Rasyid, Wahida Ardintiana. 2018. *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Larangan Mengonsumsi Minum Keras Di Kabupaten Maros*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar.
- Soerjono Soekanto. 2016. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sri Kuntari dan Eny Hikmawati. 2017. *Melacak Akar Permasalahan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)*. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 41, No. 1, April 2017, 11-26.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.